



## **KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Deasy Ariyanto**

Alumni Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Galuh  
[aryodhes@gmail.com](mailto:aryodhes@gmail.com)

### **Article History :**

Received 12 Desember 2017  
Received in revised form  
26 Desember 2017  
Accepted 30 Desember 2017  
Available offline 28 Januari 2018  
Available online 29 Januari 2018

### **Language Transcript :** Indonesia

### **Key Words :**

koordinasi,  
kelembagaan,  
efektivitas,  
penanggulangan bencana

**Abstract** - Tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas BPBD; dan hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas/instansi lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan), sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Begitu pula hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian indikator dari koordinasi telah dilaksanakan dengan baik, namun sebagian lagi masih kurang bahkan ada yang belum dilaksanakan seperti pembinaan, konsultasi dan pengarahan melalui pertemuan resmi dan rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam meningkatkan efektivitas BPBD adalah: perbedaan cara, sikap kerja, tupoksi, komitmen, prosedur, pembiayaan, persediaan prasarana dan sarana penunjang, serta kemampuan/skill. Hambatan yang ditemui dalam koordinasi untuk meningkatkan efektivitas BPBD adalah kurangnya komunikasi dan intensitas pertemuan, masih adanya sikap egosektoral dan kemampuan pelaksana dalam manajemen penanggulangan bencana.

### **1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- 4) Menghargai budaya lokal;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah daerah dan juga menjadi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dengan didukung pula oleh pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mengacu pada kajian UNISDR (*United Nations-International Strategy for Disaster Reduction*), Kabupaten Ciamis dapat dikatakan wilayah yang mempunyai kerentanan ancaman bencana yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi, kondisi morfologis dan iklim di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari perbukitan dan daratan yang memungkinkan berbagai jenis ancaman. Seperti kawasan yang rawan banjir, meliputi: Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican dan Banjarsari. Selain itu, kawasan rawan gerakan tanah longsor hampir di semua kecamatan. Untuk itu, perlu adanya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Kabupaten Ciamis sebagai daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana sangat tinggi. Selama kurun waktu 2007-2010, akibat bencana telah menimbulkan kerugian yang besar sebesar Rp. 8.849.887.550,-. Jumlah kecamatan yang tertimpa banjir sebanyak 14 kecamatan, dengan taksiran kerugian tertinggi adalah

kecamatan Cijeungjing sebesar Rp.737.910.000,-, selanjutnya jumlah kecamatan yang tertimpa bencana tanah longsor sebanyak 23 Kecamatan, dengan dengan taksiran kerugian tertinggi adalah kecamatan Rancah sebesar Rp.822.150.000,-

Selain data kerugian, berikut ini adalah potensi ancaman bencana tinggi menurut per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2012, yaitu:

**Tabel 1.** Potensi Ancaman Bencana Tinggi di Kabupaten Ciamis Per-Kecamatan Tahun 2011-2012

No	Keterangan Bencana	Jumlah Kecamatan
1.	Gempa Bumi	17
2.	Longsor	4
3.	Banjir	6
4.	Angin kencang	12
5.	Kekeringan	8
6.	Kebakaran	17
7.	Wabah penyakit	6
8.	Tsunami	6

Sumber data: RPBD Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016 (data diolah).

Berdasarkan potensi per-ancaman dihitung berdasarkan indikator pendukung terjadinya ancaman berdasarkan kategori ancaman tinggi, sedang dan rendah menurut per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis. Untuk menindaklanjuti upaya Pemerintah di tingkat pusat, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun turunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), yang didasarkan pada prinsip:

- Penyusunan RAD-PRB melibatkan para pemangku kepentingan terkait atau publik keluas-luasnya melalui konsultasi publik maupun penjarangan aspirasi dan proses perumusan dilaksanakan secara demokratis.
- Penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat;

- c) Masyarakat sebagai obyek dan subyek bagi pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usulan dan gagasan yang akan dimasukan di dalam prioritas program yang disusun pemerintah daerah;
- d) Pemerintah daerah menyediakan ruang dan akses yang mudah, agar semua pihak bisa memberikan gagasan atas upaya penanggulangan bencana termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana;
- e) Semua pihak mempunyai persepsi/pemahaman yang sama dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan upaya dan rencana aksi yang telah dirumuskan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, berdasarkan analisis terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas, Kabupaten Ciamis menetapkan kebijakan dan strategi yang salah satunya adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun program prioritas dari pengembangan dan peningkatan kelembagaan tersebut antara lain: Penguatan manajemen bencana pada institusi penanggulangan bencana, pengembangan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana dan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Mengacu pada uraian di atas maka diketahui bahwa kenyataan di lapangan terkait dengan fungsi koordinasi kelembagaan antara BPBD dengan instansi lainnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis ternyata belum menunjukkan hasil yang efektif. Berdasarkan peninjauan awal, diketahui adanya indikasi-indikasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Pada pra bencana, masing-masing SKPD kurang proaktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi atau simulasi. Hal itu terlihat pada waktu simulasi tanggap bencana banyak yang tidak hadir.
- b) Alur pengambilan keputusan dan peran masing-masing SKPD masih bersifat parsial. Hal ini tercermin dari belum adanya kesamaan pandangan dan *action* di lapangan terutama pada saat tanggap darurat.
- c) Capaian kerja BPBD yang belum maksimal, hal itu terlihat dari kondisi kerja pada awal RAD PRB dan target capaian setiap tahun yang belum mencapai angka capaian 100%. Dapat diketahui bahwa kondisi kinerja pada awal periode adalah 100% namun target capaian yang diperoleh sangat bervariasi, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 untuk indikator pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan sebesar 98% dari tahun sebelumnya, selanjutnya kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 mengenai indikator pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya

keselamatan dan ketahanan menjadi 100% dari tahun sebelumnya.

- d) Peran BPBD sebagai koordinator belum tampak, hal ini terlihat dari pelayanan dan mekanisme penanganan bencana yang melibatkan organisasi publik (swasta, relawan dan lain-lain) belum terintegrasi dengan baik padahal Kabupaten Ciamis memiliki potensi bencana yang cukup besar. Potensi bencana tersebut tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Potensi Bencana di Kabupaten Ciamis (Dilihat Dari Segi Nilai Probabilitas dan Dampak) Tahun 2012-2016

No	Keterangan Bencana	Nilai Probabilitas	Nilai Dampak
1.	Gempa Bumi	4	5
2.	Longsor	5	3
3.	Banjir	4	3
4.	Angin kencang	4	2
5.	Kekeringan	3	3
6.	Kebakaran	4	2
7.	Wabah penyakit	3	2
8.	Tsunami	3	5

*Sumber data: RPBD Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016 (data diolah).*

Dari data di atas diketahui bahwa longsor memiliki nilai probabilitas tertinggi dengan nilai 5, dan nilai dampak tertinggi dengan nilai 5 untuk bencana gempa bumi. Analisis risiko dalam pengurangan resiko bencana didasarkan pada ancaman tunggal, namun juga ancaman ini dapat saling beruntun dan mempengaruhi.

## 2. METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:29): "Pendekatan kualitatif diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang dikaji secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sekaligus

dipertanggungjawabkan baik secara praktis maupun secara keilmuan".

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari unsur pengarah dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis, khususnya saat tanggap darurat. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

- Ketua Pengarah (Kepala BPBD) : 1 Orang
- Kepala Dinas Kesehatan : 1 Orang
- Kepala Dinas PUPRP : 1 Orang
- Kepala Dinas Sosial : 1 Orang

Selanjutnya alat pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: a. Observasi dan b. Wawancara. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Penelitian ini berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis. Penelitian ini di mulai dari tahap persiapan, seminar perbaikan, pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

Koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis sudah berjalan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki misalnya:

- Perlu diadakannya pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit terkait dengan membahas hal-hal yang harus dikoordinasikan dalam penanggulangan bencana
- Membuat suatu buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit secara lebih detail dan bisa dipakai oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis yaitu dengan cara mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan terdapat beberapa faktor pendorong sebagai potensi sumber dengan membentuk suatu Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Ciamis dimana di dalamnya terdapat unsur pemerintah, dunia usaha, pelbagai komunitas serta relawan penanggulangan bencana serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara dinas, lembaga pemerintah baik secara pemaduan program dan kegiatan masing-masing termasuk aspek penganggaran.

Hambatan-hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis yaitu:

- Kurang maksimalnya sosialisasi penanganan/penanggulangan bencana;
- Kurangnya pemahaman terhadap petunjuk-petunjuk yang tertuang pada RPBD dan RAD oleh masing-masing SKPD sehingga terkadang berpengaruh pada mekanisme penanganan/penanggulangan bencana secara bersama-sama di lapangan;
- Peran BPBD sebagai koordinator belum secara maksimal terutama bila dilihat dari upaya menindaklanjuti panduan dalam RPBD dan RAD;
- Kurangnya pertemuan-pertemuan antar SKPD yang terlibat baik dalam hal sosialisasi, FGD maupun rakor-rakor terkait kontijensi penanganan bersama secara terpadu; dan
- Ketersediaan dana yang belum memadai (misalnya dana taktis) dikarenakan bencana tidak masuk tanggap darurat.

Selanjutnya upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan misalnya dengan mengadakan/mengikutkan pegawai yang terlibat pada diklat, pertemuan seminar yang berkaitan dengan penanganan bencana sehingga pemahaman dan pengetahuan akan penanganan bersama menjadi lebih baik.

### 3.2 Pembahasan

#### a) *Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis*

Peran BPBD dalam penanganan bencana di Kabupaten Ciamis akan efektif jika koordinasi kelembagaan dilakukan dengan menerapkan empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi, dan mengacu pada indikator-indikator koordinasi kelembagaan menurut pendapat:

- 1) Koordinasi Kelembagaan mengacu pada pendapat Manullang (2008:72-73), yaitu:
  - Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan.
  - Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi..
  - Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing- masing unit.

- Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.
- 2) Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada pendapat Muasaroh (2010:13) yaitu:
- Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik;
  - Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana kegiatan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan, maka rencana atau program dikatakan efektif;
  - Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan kegiatan atau program, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
  - Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai dari kegiatan tersebut.

Mengacu pada uraian di atas diketahui bahwa dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas.

Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan organisasi baik pemerintah maupun swasta/perusahaan tidak akan tercapai.

Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara baik dan tepat sasaran maka perlu diketahui sebelumnya karakteristik dari organisasi tersebut. Berkaitan dengan karakteristik organisasi maka Solihin (2009:91), menjelaskan bahwa karakteristik pertama dari organisasi adalah “adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan”.

Dari uraian-uraian penanganan bencana di atas maka diperlukan adanya suatu koordinasi yang matang dan terencana dari pihak terkait. Koordinasi kelembagaan dalam penelitian ini adalah koordinasi antar lembaga yang sederajat (BPBD dengan Dinkes, Dinsos dan Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis), dalam melaksanakan program penanggulangan bencana baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Terry (Hasibuan, 2006:85), mengatakan bahwa “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Masih dalam buku yang sama, Awaluddin juga berpendapat bahwa “Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling

melengkapi”. Selain mengacu pada indikator-indikator di atas maka penelitian ini juga mengacu pada koordinasi horizontal, sebagaimana pendapat Kencana (2011:35), bahwa: “Koordinasi horizontal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat”.

Dengan demikian mengacu pada indikator-indikator di atas maka Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis sudah berjalan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki misalnya:

- Perlu diadakannya pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit terkait dengan membahas hal-hal yang harus dikoordinasikan dalam penanggulangan bencana.
- Membuat suatu buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit secara lebih detail dan bisa dipakai oleh masing-masing pihak yang terlibat.

***b) Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis***

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- Kelestarian lingkungan hidup;
- Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- Lingkup luas wilayah.

Koordinasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, salah satunya agar semua

tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Maka dari itu, tujuan koordinasi adalah menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Adapun sifat-sifat koordinasi menurut Hasibuan (2006:87), yaitu:

- Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Namun demikian, tentu banyak faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu koordinasi. Adapun sebab-sebab timbulnya masalah koordinasi menurut Handayani (1994:93-94), yaitu:

- Sejumlah dan kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh berbagai-bagai unit atau perorangan.
- Bertambahnya pengkhususan-pengkhususan daripada berbagai kegiatan sehingga memperbesar struktur itu sendiri.
- Dengan semakin kompleksnya dan besarnya struktur organisasi menambah pula masalah koordinasi. Demikian pula asas daripada rentang pengendalian (*span of control*) termasuk pula dalam masalah koordinasi.

Berkaitan dengan kajian yang diteliti, jawaban informan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas BPBD di kabupaten Ciamis sangat beraneka ragam terutama bila dianalisis dari faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan koordinasi dalam menunjang efektivitas BPBD untuk penanggulangan bencana.

Dari hasil wawancara dapat penulis deskripsikan bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat keberhasilan koordinasi dalam menunjang efektivitas BPBD untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis. Selain karena Tupoksi dan prosedur pengambilan keputusan yang masih parsial, juga anggaran/biaya yang terbatas, kemudian kesadaran dan kemampuan pelaksana serta sarana dan prasarana penunjang yang saat ini masih belum memadai.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan hasil observasi bahwa faktor dominan yang mempengaruhi tingkat koordinasi kelembagaan dalam penanganan bencana di Kabupaten Ciamis adalah anggaran, komitmen dan kemampuan pelaksana.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan koordinasi dalam menunjang efektivitas BPBD untuk penanggulangan bencana antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Tupoksi dan prosedur pengambilan keputusan yang masih parsial. Selain itu diketahui bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan atau pembiayaan. Di mana aktivitas keuangan dalam kelembagaan merupakan suatu urat nadi untuk pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula dengan dukungan kemampuan personil/pelaksana. Kemampuan keterampilan dan kemahiran penyelesaian pekerjaan sangat dibutuhkan sehingga seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawab setiap orang/unit dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Sementara itu, komitmen dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan. Karena sikap ini kerap tercermin dari kepercayaan pelaksana terhadap misi dan tujuan kegiatan serta akan terus berusaha lebih keras lagi untuk merealisasikannya.

Selain hal di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan

efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis dengan cara mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan terdapat beberapa faktor pendorong sebagai potensi sumber dengan membentuk suatu Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Ciamis dimana didalamnya terdapat unsur pemerintah, dunia usaha, pelbagai komunitas serta relawan penanggulangan bencana serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara dinas, lembaga pemerintah baik secara pemaduan program dan kegiatan masing-masing termasuk aspek penganggaran.

**c) *Hambatan-Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Koordinasi Kelembagaan Guna Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis***

Hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis dikarenakan:

- Kurang maksimalnya sosialisasi penanganan/penanggulangan bencana;
- Kurangnya pemahaman terhadap petunjuk-petunjuk yang tertuang pada RPBD dan RAD oleh masing-masing SKPD sehingga terkadang berpengaruh pada mekanisme penanganan/penanggulangan bencana secara bersama-sama di lapangan;
- Peran BPBD sebagai koordinator belum secara maksimal terutama bila dilihat dari upaya menindaklanjuti panduan dalam RPBD dan RAD;
- Kurangnya pertemuan-pertemuan antar SKPD yang terlibat baik dalam hal sosialisasi, FGD maupun rakor-rakor terkait kontijensi penanganan bersama secara terpadu; dan

- Ketersediaan dana yang belum memadai (misalnya dana taktis) dikarenakan bencana tidak masuk tanggap darurat.
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
- Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hambatan dalam meningkatkan efektivitas BPBD di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya kurangnya komunikasi dan intensitas pertemuan, masih adanya sikap egosektoral dan kemampuan pelaksana dalam manajemen penanggulangan bencana.

Selanjutnya, upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Ciamis diantaranya:

- Memaksimalkan sosialisasi penanganan/penanggulangan bencana;
- Mengupayakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap petunjuk-petunjuk yang tertuang pada RPBD

dan RAD oleh masing-masing SKPD sehingga terkadang berpengaruh positif pada mekanisme penanganan/penanggulangan bencana secara bersama-sama di lapangan misalnya dengan secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan antar SKPD yang terlibat baik dalam hal sosialisasi, FGD maupun rakor-rakor terkait kontijensi penanganan bersama secara terpadu; dan

- Ketersediaan dana yang memadai (misalnya dana taktis) misalnya dengan menambah dana bencana dan membuat peraturan pengatur yang lebih lanjut terkait bantuan keuangan walaupun sebenarnya bantuan parsial dari masing-masing SKPD telah dilakukan, misalnya:

Upaya di atas akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh semua pihak yang terlibat. Bila dilihat secara luas maka keefektifan suatu kegiatan maupun organisasi tidak dipandang sebagai variabel yang berdiri sendiri tetapi disebabkan oleh variabel lainnya yaitu sebab-sebab keefektifan.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan dapat digunakan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman).

#### 4. SIMPULAN

Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari temuan penelitian bahwa kurang adanya

pertemuan-pertemuan rutin antar SKPD baik dalam hal sosialisasi, FGD maupun rakor-rakor terkait kontijensi penanganan bencana secara terpadu. Meskipun terdapat buku panduan penanggulangan bencana yakni dalam buku RPBD dan RAD, namun masing-masing SKPD kurang membacanya dan mengakibatkan mekanisme pada waktu penanganan bersama masih bingung atau tidak memahaminya. Kelemahan-kelemahan ini merujuk kepada kurangnya pemahaman koordinasi pada masing-masing pihak terkait dan BPBD belum menjalankan perannya secara maksimal sebagai koordinator. Faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh kekakuan antar SKPD karena kesamaan eselonering dan egosektoral sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Adapun bantuan parsial dari masing-masing SKPD yang sudah dilakukan terutama pada saat tanggap darurat yaitu : Dinas PUPRP (Bantuan karung dan paralon serta alat berat), Dinas Sosial (bantuan makanan dan tenda), BPBD (Bantuan sembako, tenda, selimut dan sebagainya), serta Dinas Kesehatan memberikan bantuan obat-obatan.

Sementara itu, hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan efektivitas penanggulangan bencana adalah ketersediaan dana yang belum memadai. Untuk tanggap darurat memang ada dana taktis/tak terduga dalam rekening daerah, Namun untuk bencana yang tidak masuk tanggap darurat masih perlu pengaturan lebih lanjut. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dalam menangani suatu bencana bukan berarti selalu berlangsung mulus dan tanpa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut bisa berupa biaya, prosedur kelembagaan maupun jumlah organisasi yang terlibat di dalam penanganan bencana dengan beragam latar belakang tujuan ataupun misi. Beberapa penelitian yang sama juga mengindikasikan adanya faktor yang menentukan berhasil tidaknya sebuah koordinasi dalam penanganan bencana.

Koordinasi yang sukses di dalamnya ditentukan oleh faktor asset keuangan, teknologi, warga, kepemimpinan, upaya ekstra, pengalaman dan pendidikan yang relevan, kemampuan manajerial kaitannya dengan humas, kemampuan penelitian dan kemampuan-kemampuan pengukuran kinerja. Tujuan koordinasi di dalam konteks bencana adalah berupa efektivitas di respon terhadap bencana dimaksud. Koordinasi yang solid sering dinyatakan terbukti mampu mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan sekaligus merupakan faktor sukses utama di dalam penanganan bencana. Berkenaan dengan fase tanggap darurat, sebuah tanggap-darurat yang terkoordinasikan dengan baik merupakan faktor kunci di dalam efektivitas tanggap-darurat terkait. Dan kurangnya koordinasi juga sekaligus merupakan salah satu sebab diantara berapa sebab yang ada, gagalnya sebuah tanggap darurat bencana. Secara garis besar, untuk bisa membuat suatu sistem koordinasi yang baik, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Keikutsertaan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam situasi darurat bencana. Koordinasi dilakukan melalui proses yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Seseorang atau suatu badan atau organisasi yang ditunjuk sebagai koordinator sudah semestinya mampu membangun suasana yang baik dan saling menghormati antara setiap pemangku kepentingan.
- 2) Tidak berpihak kepada sesuatu (Imparsial). Koordinasi bertujuan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan pada unsur lainnya , termasuk bukan pilihan politis.
- 3) Dilakukan secara transparan. Koordinasi membutuhkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Setiap proses

pengambilan keputusan dan pemberian informasi mesti dilakukan secara transparan dan jujur, termasuk jika terjadi kegagalan tetap diinformasikan dan tidak ditutup-tutupi untuk kepentingan tertentu.

- 4) Bermanfaat bagi masyarakat yang terkena bencana maupun pemangku kepentingan lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.

Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muasaroh. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas*. Jakarta: Mega Ilmu.

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 Tentang *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis*.

